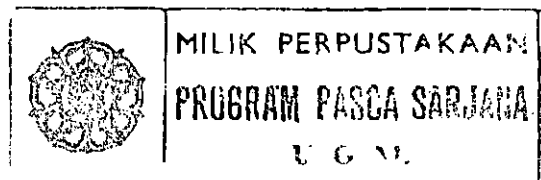


- Adachi, Seiji, **Commente and recommendation for the implementation, of foreign capital investmen**, Makalah pada Two days Seminar on Goverent regulation, No.17 1992, Mandarin Orientel Jakarta, 19 & 20 Agustus 1992
- Goldswieg, David N, **Joint ventering abroad, A Case study**, America Bar association Section of Internasional Law and Practise, tanpa tahun
- Dirdjosisworo Soedjono, 1999, **Hukum Perusahaan mengenai Penanaman Modal di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung;
- Hartono, 2002, **Bagaimana Menulis Tesis**, UMM Press, Malang;
- Rajagukguk Erman, 1995, **Hukum Investasi**, I, UI Press, Jakarta;
- Sharp,F. William, dkk, 1997, **Investasi**, I, Dadi Karyana Abadi, Jakarta;
- Siregar R.K, 1999, **Kebutuhan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau**, Tesis, Yogyakarta;
- Soekanto Soerjono, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta;
- Soekanto ,S dan Mamudji,S, 1990, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta;
- Sumardjono, Maria, S.W, 1997, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Sunardi, 2000, **Kebutuhan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Riau**, Tesis, Yogyakarta;
- Tandelilin, Eduardus, 2001, **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio**, I, BFE, Yogyakarta.
- Himawan, Charles, **The Foreign Investmen Process in Indonesia**, Gunung Agung, Singapura, 1980.
- Widjaya, Rai I.G, **Penanaman Modal**, Pradnya Paramita, Bandung, 2000.
- Asia Busnees Law Revieww, No. 2 Juli 1993
- Kompas, 24 Juli 1993
- Republika, 30 Desember 1993





Peran badan promosi dan investasi daerah (BPID) Propinsi Papua dalam meningkatkan arus investasi di Papua

HOWAY, Edison, Prof. Emmy Pangaribuan S., SH

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang PMA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang PMDN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham yang didirikan dalam rangka PMA.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 Tentang BKPM

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 Tentang BKPM

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 Tentang BKPM

SK. Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM No.37/SK/99 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta perizinan pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah.

SK. Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM No.38/SK/99 Tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.